



ບໍລິຫານຊຸມຊົນ ທາລີ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ກຳລັງບໍລິຫານຊຸມຊົນ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

ຄະນະຊຸມຊົນ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ (ບໍລິຫານ)

JALAN W.R. SUPRATMAN NOMOR 71 DENPASAR – BALI (80236)

ທາລີ ທາລີ (ບໍລິຫານ) ທາລີ ທາລີ

TELEPON (0361), 228716

WEBSITE: [www.distanpangan.baliprov.go.id](http://www.distanpangan.baliprov.go.id) EMAIL: [distanpangan@baliprov.go.id](mailto:distanpangan@baliprov.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI BALI

NOMOR : 1012 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
  - b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana tentang Daftar Informasi Publik pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor 1012 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2023.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, tercantum seperti pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pada saat berlaku Keputusan Kepala Dinas Nomor 69946 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali,  
Pada tanggal 2 Januari 2023



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI**  
**NOMOR : 1012 TAHUN 2023**  
**TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI**  
**2023**

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Softcopy	
<b>A. INFORMASI BERKALA</b>								
1.	Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Memuat Informasi tentang visi & misi, tupoksi badan publik, profil singkat kepala dinas, alamat lengkap, data pegawai/sumber daya manusia	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Softcopy	
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)	Memuat laporan pertanggungjawaban dan kinerja badan publik	Sub Koord. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi & Pelaporan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
3.	Laporan Forum Konsultasi Publik	Memuat informasi program/kegiatan tahunan dan pelayanan	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
4.	Laporan Tahunan LPPD	Memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2022	Sub Koord. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi & Pelaporan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
5.	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	Memuat Informasi tentang persentase indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
6.	Daftar Peraturan Perundang-undangan,	Memuat Informasi peraturan dan	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kepala Dinas Pertanian dan	2023	✓	✓	Aktif



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Softcopy	
	Keputusan/ Kebijakan yang telah disahkan ditetapkan	kebijakan yang telah disahkan/ditetapkan		Ketahanan Pangan Provinsi				
7.	Rencana Strategis	Memuat Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.	Sub Koord. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi & Pelaporan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
8.	Rencana Kerja Tahunan	Memuat informasi rencana kerja Badan Publik	Sub Koord. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi & Pelaporan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif



No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Softcopy	
9.	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (RKA-KL/DPA)	Memuat informasi realisasi kegiatan anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran	Sub Koord. Unit Substansi Keuangan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
10.	CALK	Memuat informasi tentang catatan atas laporan keuangan	Sub Koord. Unit Substansi Keuangan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
<b>B. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT</b>								
11.	Daftar Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan, Keputusan/Kebijakan yang telah disahkan/ditetapkan	Memuat informasi tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan/kebijakan yang telah disahkan/ditetapkan	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
12.	Data Distribusi Pupuk Prov. Bali	Memuat informasi distribusi pupuk di Provinsi Bali	Bidang Sumber Daya Pertanian	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif



No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Softcopy	
13.	Data Benih Tanaman Pangan & Hortikultura	Memuat informasi benih tanaman pangan dan hortikultura	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
14.	Data Keadaan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Memuat informasi serangan organisme pengganggu tanaman	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
15.	Data Statistik Perkebunan	Memuat informasi tentang data potensi/hasil perkebunan	Bidang Perkebunan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
16.	Data Harga Komoditas Pertanian dan Perkebunan	Memuat Informasi tentang harga komoditas Pertanian & Perkebunan	Bidang Pascapanen, Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
17.	Pelayanan Sertifikasi dan Pembelian Benih	Memuat informasi pelayanan sertifikasi dan pembelian benih	UPTD. Balai Perbenihan Pengawasan	Kepala Dinas Pertanian dan	2023	✓	✓	Aktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Softcopy	
			Sertifikasi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Ketahanan Pangan Provinsi				
18.	Pengujian Mutu Hasil Pertanian	Memuat informasi alur pengujian mutu hasil pertanian (PSAT)	UPTD. Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
19.	Registrasi kebun/lahan usaha	Memuat informasi tentang registrasi kebun/lahan usaha	Bidang Pascapanen Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
<b>C. INFORMASI SERTA MERTA</b>								
20.	Daftar Kasus Wabah Rabies di Provinsi Bali	Memuat informasi tentang kasus wabah rabies di Provinsi Bali	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Softcopy	
21.	Daftar Kasus Wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) di Provinsi Bali	Memuat informasi tentang wabah kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) di Provinsi Bali	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif
22.	Daftar Kasus Wabah Penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Memuat informasi tentang kasus wabah penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	UPTD. Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2023	✓	✓	Aktif

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
**I WAYAN SUNADA**  
 NIP. 19671231 198703 1 056



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI**  
**NOMOR : 1012 TAHUN 2023**  
**TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI**

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI BALI**

No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Daftar riwayat hidup, rekam medis, nomor rekening pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> <li>• UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian</li> </ul>	Selama pegawai tidak memberikan persetujuan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai
2.		Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pelaksanaan	Memperlancar proses pelaksanaan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
		sifatnya rahasia			tugas dan fungsi lembaga	tugas dan fungsi lembaga
3.		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j</li> <li>• Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b</li> </ul>	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan Premature</li> <li>• Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa</li> </ul>	Menimbulkan persaingan sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa
4.		Dokumen Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j</li> <li>• UU Nomor 5</li> </ul>	Tidak Terbatas	Muncul persaingan yang tidak sehat	Muncul persaingan yang sehat



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			<p>Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b</li> </ul>			
5.		Dokumen penawaran penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya</li> </ul>	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persaingan yang tidak sehat



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			Pasal 6 Huruf b			
6.		Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), evaluasi penawaran/ kualifikasi/ hasil lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya</li> </ul> Pasal 6 Huruf b	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persaingan yang tidak sehat
7.		Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan</li> </ul>	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persaingan yang sehat



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			perubahannya Pasal 6 Huruf b			
8.		Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10</li> </ul>	20 Tahun	Informasi terkait dengan identitas rekening orang	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab
9.		Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i</li> <li>• Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 tentang Kode Etik Pengawas</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Dapat mengandung informasi rahasia institusi / merugikan institusi
10.		Laporan Harta Kekayaan Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h</li> <li>• Keputusan KPK Nomor</li> </ul>	Selama pejabat memberikan persetujuan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang</li> </ul>



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			Kep.07/KPK/02/2005 tentang Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pasal 5 Ayat (7) • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i		dan untuk menghindari kejahatan	tidak bertanggung jawab • Mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang
11.		Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i • Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 tentang Kode Etik Pengawas	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Mencegah citra yang negatif terhadap institusi



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
12.		Akses Ruang Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37</li> </ul>	Tidak Terbatas	Tindak kriminal pengerusakan dan pencurian data	Menjaga dan melindungi hak akses
13.		Internet Protocol (IP) Address	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Keamanan Sistem/ Jaringan
14.		Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j</li> <li>• UU Nomor 11</li> </ul>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Keamanan Sistem





No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 16			
15.		Data hasil uji laboratorium Keswan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Terbatas dengan persetujuan	Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang Berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat
16.		Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Menimbulkan persaingan yang sehat



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
17.		Usulan Pelepasan Varietas Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b</li> <li>• Permentan Nomor 37/Permentan/OT.140/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b</li> </ul>	Setelah Varietas Dilepas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain	Mencegah varietas baru diambil oleh pihak lain
18.		Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu
19.		Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Pengujian Mutu Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> </ul>	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi dan Kabupaten</li> </ul>			
20.		Proses uji laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> <li>• PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi dan Kabupaten</li> </ul>	Sampai ada keputusan resmi/hasil uji resmi	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh
21.		Proses uji mutu pangan di produsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> <li>• UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</li> </ul>	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 69 Tahun 1999 Tentang Iklan dan Pelabelan</li> <li>• UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan</li> </ul>			


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
**I WAYAN SUNADA**  
 NIP. 19671231 198703 1 056



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE